eMagazine

PARLEMENTARIA

KOTA TANGERANG



AKUNTABILITAS APBD, FONDASI PEMBANGUNAN KOTA TANGERANG

Scan For Visit Website

EDISI VII/JULI 2026

REDAKSI



PENERBIT
DPRD Kota Tangerang

PEMBINA
H. Rusdi, S.Th.I., M.S.M
Andri S. Permana, S.Sos, M.AP
Arief Wibowo, ST. MM
Ir. H. Turidi Susanto, S.T., M.Tr,IP

KETUA
Teddy Bayu Putra, S.SOS., M.SI

WAKIL KETUA
Sony Maulana, S.H., M.KKK

SEKRETARIS
Ginasya Oktaviani, S,STP., MM

EDITOR
Miharja Akhdyat Mohammad, SE, Ak.

REPORTER
Awien Sinatrya
Desi Wahyuni
Erdi Alfarizky
Liesdia Desmawati

FOTO/VIDEOGRAPHER
Ananda Adining Putra
Muhamad Dimas Khoiro
Muhammad Iqbal

FOTO/VIDEO EDITOR
Roes Nurtiyono

DESAIN GRAFIS
Tri Waluyo Adhie
Endang Suhendar

EMAIL
dprdkotatng@gmail.com
@dprdkotatangerang
@dprdkotatangerang
@dprdkotatangerang
dprd.kotatangerang.go.id

ALAMAT
DPRD Kota Tangerang
Gedung Pusat Pemerintahan
Jl. Satra Sudirman No 1.

DARI MEJA

REDAKSI

AKUNTABILITAS SEBAGAI PILAR KEPERCAYAAN PUBLIK

PENGELOLAAN keuangan daerah yang akuntabel merupakan fondasi penting dalam penyelenggaraan pemerintahan. Setiap program yang direncanakan dan setiap anggaran yang dibelanjakan pada akhirnya harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat sebagai pemilik mandat pembangunan. Karena itu, pengesahan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 menjadi momentum untuk melihat sejauh mana pembangunan telah berjalan sesuai tujuan yang telah ditetapkan.

Pada edisi ini, kami mengangkat tema "Akuntabilitas APBD, Fondasi Pembangunan Kota Tangerang" sebagai refleksi atas komitmen DPRD Kota Tangerang dalam menjalankan fungsi legislasi, penganggaran, dan pengawasan. Pembahasan laporan pertanggungjawaban APBD tidak berhenti pada penilaian terhadap angka-angka realisasi anggaran, tetapi juga menelaah efektivitas kebijakan, kualitas pelaksanaan program, hingga langkah perbaikan yang perlu dilakukan untuk menghadirkan pelayanan publik yang semakin baik.

Berbagai rekomendasi yang disampaikan DPRD menunjukkan bahwa pembangunan daerah memerlukan evaluasi yang berkesinambungan. Penyempurnaan regulasi, penguatan pengawasan, optimalisasi Pendapatan Asli Daerah, hingga peningkatan kualitas perencanaan menjadi bagian dari upaya membangun tata kelola pemerintahan yang lebih efektif, transparan, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Di sisi lain, capaian Pendapatan Asli Daerah yang melampaui target pada Tahun Anggaran 2025 menjadi modal positif bagi Kota Tangerang. Namun, keberhasilan tersebut juga menghadirkan tantangan untuk terus meningkatkan kualitas tata kelola pendapatan melalui inovasi, pemanfaatan teknologi, serta penyusunan kebijakan yang berbasis pada potensi riil daerah. Dengan demikian, kapasitas fiskal yang semakin kuat dapat mendukung pembangunan yang berkelanjutan.

Semoga sajian dalam majalah edisi ini dapat memberikan gambaran yang utuh mengenai berbagai langkah DPRD Kota Tangerang dalam mengawal akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Besar harapan kami, informasi yang disajikan dapat memperluas pemahaman pembaca sekaligus memperkuat semangat bersama untuk mewujudkan pemerintahan yang semakin akuntabel, transparan, dan berpihak pada kepentingan masyarakat. ■

DAFTAR ISI



HAL. 4
LAPORAN UTAMA
AKUNTABILITAS APBD, FONDASI PEMBANGUNAN KOTA TANGERANG



HAL. 12
Selamat Jalan
H. Rusdi, S.Th.I., M.S.M.



HAL. 18
KOMISI I
SIDAK BERBUAH KESEPAKATAN, AKSES JALAN RW 05 PORIS GAGA DIBUKA



HAL. 27
PERSETUJUAN TPP PPPK TEKNIS
TASRIL: JANGAN SAMPAI PPPK TEKNIS, MERASA MENJADI ASN KELAS DUA





NAIK PODIUM: Wakil Ketua I DPRD Kota Tangerang, Andri S. Permana saat menbacakan Pengesahan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025, di Ruang Rapat Paripurna DPRD Kota Tangerang.

LAPORAN UTAMA

AKUNTABILITAS APBD, FONDASI PEMBANGUNAN KOTA TANGERANG

Pengesahan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025 menjadi salah satu tahapan penting dalam siklus pengelolaan keuangan daerah. Lebih dari sekadar memenuhi amanat peraturan perundang-undangan, proses ini menjadi ruang evaluasi menyeluruh terhadap efektivitas penggunaan anggaran serta arah pembangunan yang telah dijalankan Pemerintah Kota Tangerang sepanjang tahun anggaran.

BAGI DPRD Kota Tangerang, laporan pertanggungjawaban APBD merupakan instrumen untuk memastikan setiap rupiah anggaran memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Melalui fungsi pengawasan, DPRD melakukan pembahasan secara mendalam terhadap capaian kinerja, realisasi program, hingga berbagai temuan yang masih memerlukan perbaikan agar kualitas tata kelola pemerintahan terus meningkat.

Selain mengawal akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah, DPRD juga terus menjalankan fungsi legislasi melalui pembahasan sejumlah rancangan peraturan daerah yang memiliki peran strategis bagi penyelenggaraan pemerintahan. Di antaranya adalah Rancangan Peraturan Daerah tentang Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat yang disusun untuk menyesuaikan perkembangan regulasi nasional sekaligus memperkuat kepastian hukum dalam penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban di Kota Tangerang.



dari kiri: Wakil Ketua I DPRD Kota Tangerang, Andri S. Permana, Wakil Wali Kota Kota Tangerang, Maryono Hasan, Wali Kota Kota Tangerang, Sachrudin, Ketua DPRD Kota Tangerang, Rusdi, dan Wakil Ketua II, Arief Wibowo, foto bareng memegang dokumen kesepakatan Pengesahan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025, di Ruang Rapat Paripurna DPRD Kota Tangerang.

Pada saat yang sama, DPRD juga membahas Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Susunan Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) Pemerintah Kota Tangerang. Perubahan tersebut menjadi bagian dari penyesuaian kelembagaan, termasuk pemisahan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dan Dinas Pemadam Kebakaran agar pelaksanaan tugas pemerintahan semakin efektif, adaptif, dan mampu menjawab kebutuhan pelayanan masyarakat.

Pembahasan terhadap berbagai regulasi tersebut berjalan beriringan dengan evaluasi pelaksanaan APBD Tahun 2025. DPRD memandang bahwa penguatan regulasi, penataan kelembagaan, dan pengelolaan keuangan daerah merupakan tiga pilar yang saling melengkapi dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik. Setiap kebijakan yang disusun diarahkan untuk meningkatkan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan sekaligus memperkuat pelayanan publik.

Penyusunan rekomendasi terhadap laporan pertanggungjawaban APBD pun tidak semata berfokus pada hasil akhir pelaksanaan anggaran. DPRD menekankan pentingnya membangun pola kerja yang mampu mengidentifikasi akar persoalan, memperkuat kualitas perencanaan, meningkatkan pengawasan, serta memastikan setiap program pembangunan berjalan sesuai sasaran yang telah ditetapkan.

Dalam menjalankan fungsi pengawasan, DPRD juga terus mendorong terbangunnya tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif terhadap berbagai tantangan pembangunan. Kolaborasi antara legislatif dan eksekutif menjadi faktor penting agar setiap kebijakan yang dihasilkan mampu menjawab kebutuhan masyarakat sekaligus mendukung pembangunan daerah yang berkelanjutan.

Berbagai agenda yang dibahas sepanjang masa sidang ini menunjukkan bahwa pembangunan daerah tidak hanya ditentukan oleh besarnya anggaran yang tersedia, tetapi juga oleh kualitas perencanaan, kekuatan regulasi, efektivitas kelembagaan, serta konsistensi dalam pelaksanaan dan pengawasan kebijakan. Keseluruhan proses tersebut menjadi bagian dari upaya menghadirkan pemerintahan yang semakin profesional dan akuntabel.

Melalui pembahasan pertanggungjawaban APBD, penyempurnaan regulasi mengenai ketenteraman dan ketertiban umum, serta penataan organisasi perangkat daerah melalui perubahan SOTK, DPRD Kota Tangerang menegaskan komitmennya untuk terus mengawal setiap kebijakan strategis daerah. Langkah tersebut diharapkan mampu memperkuat fondasi pembangunan sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan publik bagi seluruh masyarakat.

Pada akhirnya, akuntabilitas bukan sekadar bentuk pertanggungjawaban atas penggunaan anggaran, melainkan komitmen bersama untuk memastikan setiap kebijakan, program, dan regulasi mampu memberikan manfaat yang nyata. Dengan semangat tersebut, DPRD Kota Tangerang terus berupaya menghadirkan tata kelola pemerintahan yang transparan, efektif, dan responsif sebagai fondasi menuju Kota Tangerang yang semakin maju dan berdaya saing. ■ SIN

Mengawal Akuntabilitas APBD

Tingkatkan Efektivitas Perbaikan Sistem dan Penguatan PAD

PENGESAHAN Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025 menjadi salah satu agenda penting DPRD Kota Tangerang dalam memastikan pengelolaan keuangan daerah berjalan secara akuntabel, transparan, dan berorientasi pada peningkatan kualitas pelayanan publik. Melalui pengesahan tersebut, DPRD juga menyampaikan berbagai rekomendasi strategis kepada Pemerintah Kota Tangerang sebagai bahan evaluasi dan perbaikan tata kelola keuangan daerah.

Pembahasan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 dilakukan secara komprehensif oleh Badan Anggaran (Banggar) DPRD bersama Pemerintah Kota Tangerang. Hasil pembahasan tersebut kemudian menjadi dasar dalam pengesahan Perda sekaligus melahirkan sejumlah rekomendasi untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan keuangan daerah pada tahun-tahun mendatang.

Wakil Ketua II DPRD Kota Tangerang, Arief Wibowo, menjelaskan bahwa rekomendasi yang diberikan DPRD tidak berhenti pada penyelesaian administratif atas temuan pemeriksaan. Menurutnya, setiap catatan yang disampaikan harus menjadi dasar bagi pemerintah daerah untuk membenahi sistem kerja sehingga persoalan serupa tidak kembali terjadi.

"Kami menerima laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 dengan beberapa catatan rekomendasi. Harapan kami, tindak lanjut atas LHP BPK tidak berhenti pada penyelesaian administratif, tetapi benar-benar menyentuh akar persoalan sehingga temuan yang sama tidak kembali terulang pada tahun-tahun berikutnya," ujar Arief.

Ia menjelaskan, DPRD memetakan tiga substansi utama yang menjadi fokus rekomendasi. Ketiga substansi tersebut meliputi penyempurnaan regulasi, peningkatan kualitas implementasi kebijakan, serta penguatan strategi optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD). Menurutnya, ketiga aspek tersebut saling berkaitan dalam membangun tata kelola pemerintahan yang lebih efektif.

Pada aspek regulasi, DPRD menilai masih terdapat sejumlah aturan pelaksana yang perlu segera diselesaikan. Meski Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah telah disahkan sebagai regulasi payung, beberapa peraturan wali kota yang menjadi landasan operasional hingga kini belum rampung.

"Kami juga memberikan perhatian pada aspek legislasi. Perda payungnya sudah selesai melalui Perda Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, tetapi masih ada beberapa peraturan wali kota yang belum rampung. Kami meminta agar regulasi mengenai pemanfaatan ruang milik jalan, retribusi persampahan, sanksi administratif atas pelanggaran PBB, hingga percepatan proses perizinan segera diselesaikan agar implementasinya lebih optimal," kata Arief.

Selain penyempurnaan regulasi, DPRD juga menyoroti pentingnya penguatan implementasi kebijakan. Berdasarkan hasil pembahasan, masih ditemukan sejumlah persoalan yang berawal dari lemahnya pengawasan terhadap pelaksanaan aturan, ketidaksesuaian



Arief Wibowo
Wakil Ketua II DPRD Kota Tangerang



Wakil Ketua II DPRD Kota Tangerang, Arief Wibowo seusai Rapat Paripurna Pengesahan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025, di Ruang Rapat Paripurna DPRD Kota Tangerang.

antara proses perencanaan dengan ketentuan yang berlaku, maupun pelaksanaan kegiatan yang tidak sepenuhnya mengacu pada dokumen perencanaan yang telah ditetapkan. DPRD juga merekomendasikan penguatan validasi data objek pajak dan retribusi, digitalisasi sistem pemungutan, percepatan penyelesaian piutang daerah, serta peningkatan efektivitas penagihan sebagai langkah untuk meminimalkan potensi kebocoran penerimaan daerah.

DPRD juga mendorong Pemerintah Kota Tangerang melakukan kajian menyeluruh terhadap potensi riil Pendapatan Asli Daerah, baik yang bersumber dari pajak maupun retribusi daerah. Hasil kajian tersebut diharapkan menjadi dasar dalam menetapkan target pendapatan yang lebih akurat, sehingga tidak hanya mengacu pada capaian tahun sebelumnya, tetapi mencerminkan potensi yang sesungguhnya dimiliki Kota Tangerang.

Meski demikian, kinerja pendapatan daerah sepanjang Tahun Anggaran 2025 menunjukkan capaian yang menggembirakan. Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) mencapai Rp3,097 triliun atau 101,95 persen dari target sebesar Rp3,038 triliun, dengan kelebihan capaian sekitar Rp59,28 miliar. Kontribusi terbesar berasal dari Pajak Daerah yang terealisasi sebesar Rp2,722 triliun atau 100,40 persen dari target Rp2,711 triliun, meningkat sekitar Rp643,98 miliar atau 30,98 persen dibandingkan tahun 2024. Sementara itu, Retribusi Daerah juga melampaui target dengan realisasi Rp292,04 miliar atau 107,07 persen dari target Rp272,75 miliar, meningkat sekitar 286,18 persen dibandingkan realisasi tahun sebelumnya. Menurut DPRD, capaian tersebut perlu dipertahankan melalui penguatan tata kelola, penyempurnaan regulasi, serta optimalisasi potensi penerimaan daerah agar pertumbuhan PAD dapat berlangsung secara berkelanjutan.

"Target penghimpunan PAD harus disusun berdasarkan potensi riil yang dimiliki daerah, bukan semata-mata mengacu pada capaian tahun sebelumnya. Dengan begitu kita dapat mengetahui faktor-faktor yang menghambat optimalisasi pendapatan, apakah bersifat struktural atau persoalan lainnya. Peningkatan PAD juga harus diiringi pembenahan sistem melalui validasi data, digitalisasi pemungutan, serta penguatan tata kelola agar potensi yang dimiliki Kota Tangerang dapat dimaksimalkan tanpa menambah beban masyarakat," ujar Arief.

"Harapan kami dari pertanggungjawaban pelaksanaan APBD ini adalah lahirnya pola kerja yang mampu menganalisis akar persoalan secara sistemik, menyelesaikan berbagai temuan BPK, mengoptimalkan serapan anggaran, dan mencegah persoalan serupa terjadi kembali. Target penghimpunan PAD juga harus disusun berdasarkan potensi riil yang dimiliki daerah sehingga kebijakan yang diambil benar-benar mampu memperkuat kapasitas fiskal daerah dan pada akhirnya meningkatkan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat," tutup Arief. ■ SIN

Intensifkan Pembahasan Revisi Perda

Pansus VI Perkuat Regulasi Ketenteraman dan Ketertiban

FOTO: ANANDA ADINING PUTRA



Christian Lois, Ketua Pansus VI DPRD Kota Tangerang.

DPRD Kota Tangerang melalui Panitia Khusus (Pansus) VI terus mengintensifkan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 8 Tahun 2018 tentang Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat.

Ketua Pansus VI DPRD Kota Tangerang, Christian Lois, mengatakan revisi perda diperlukan sebagai langkah penyesuaian terhadap perkembangan regulasi sekaligus untuk memperkuat implementasi ketentuan di lapangan. Salah satu materi yang dibahas ialah penyesuaian sanksi agar selaras dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, termasuk perubahan nomenklatur perizinan dari Izin Mendirikan Bangunan (IMB) menjadi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG).

"Ada beberapa pasal yang perlu disesuaikan, terutama terkait sanksi agar selaras dengan regulasi yang lebih tinggi, serta perubahan istilah perizinan dari IMB menjadi PBG. Namun, pembahasan ini juga menitikberatkan pada penyelarasan dan sinergi seluruh OPD dalam pelaksanaan ketentuan yang diatur dalam perda," ujar Christian.

Selain melakukan penyesuaian terhadap sejumlah pasal, Pansus VI juga menginventarisasi berbagai masukan dari organisasi perangkat daerah sebagai bahan penyempurnaan substansi Raperda. Langkah tersebut dilakukan agar regulasi yang disusun dapat diimplementasikan secara optimal dan menjawab kebutuhan penyelenggaraan ketenteraman serta ketertiban umum di Kota Tangerang.

Menurut Christian, Perda Nomor 8 Tahun 2018 mengatur sedikitnya 15 aspek ketertiban yang selama ini menjadi pedoman pemerintah daerah dalam menjaga ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat. Ia menilai substansi perda tersebut masih relevan, namun memerlukan sejumlah penyesuaian seiring perkembangan kondisi sosial di masyarakat.

"Seiring perkembangan dinamika sosial, tentu ada beberapa penyesuaian yang perlu dilakukan. Seluruh masukan dari OPD akan menjadi bahan evaluasi sekaligus poin-poin perubahan yang nantinya akan kami finalisasi dalam Raperda ini," katanya.

Melalui perubahan perda ini, DPRD Kota Tangerang berharap perangkat daerah memiliki pedoman yang semakin jelas dalam melaksanakan tugas penegakan peraturan daerah. Regulasi yang adaptif juga diharapkan mampu memberikan kepastian hukum sekaligus memperkuat upaya menciptakan lingkungan yang aman, tertib, dan kondusif bagi masyarakat.

"Pada akhirnya, regulasi ini harus mampu menghadirkan ketenteraman, ketertiban, perlindungan masyarakat, serta memberikan kenyamanan bagi seluruh warga Kota Tangerang," tutupnya. ■ SIN



FOTO: ANANDA ADINING PUTRA

Panitia Khusus (Pansus) VI menggelar rapat terkait pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 8 Tahun 2018 tentang Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat, di ruang rapat BANMUS, DPRD Kota Tangerang.

Raperda SOTK

Pemisahan BPBD dan Damkar, Optimalkan Kualitas Layanan



FOTO: ANANDA ADINING PUTRA

Panitia Khusus (Pansus) V terus mematangkan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Perubahan Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) yang mengatur pemisahan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dan Dinas Pemadam Kebakaran (Damkar), di ruang rapat BANGGAR, DPRD Kota Tangerang.

DPRD Kota Tangerang melalui Panitia Khusus (Pansus) V terus mematangkan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Perubahan Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) yang mengatur pemisahan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dan Dinas Pemadam Kebakaran (Damkar).

Rapat dipimpin Ketua Pansus V DPRD Kota Tangerang, Kemal Fasya Madjid, didampingi Wakil Ketua Pansus V, Mulyadi H. Muslih, serta dihadiri anggota pansus. Turut hadir Kepala BPBD Kota Tangerang, Mahdiar, beserta jajaran untuk memaparkan kesiapan organisasi dalam menghadapi pemisahan kedua perangkat daerah tersebut.

Dalam pembahasan, Pansus V memberikan perhatian khusus terhadap kesiapan sumber daya manusia sebagai faktor penting dalam mendukung efektivitas pelaksanaan perubahan struktur organisasi. Ketersediaan personel dinilai menjadi salah satu aspek yang harus dipastikan sebelum kebijakan pemisahan diimplementasikan.

Anggota Pansus V DPRD Kota Tangerang, Anggiat Sitohang, menegaskan bahwa pemisahan BPBD dan Damkar merupakan amanat regulasi yang harus dilaksanakan. Namun, menurutnya, implementasi kebijakan tersebut perlu dibarengi dengan perencanaan kebutuhan SDM yang matang agar pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan optimal.

"Pemisahan BPBD dan Damkar merupakan amanat regulasi yang harus dilaksanakan. Namun, kesiapan SDM harus dikaji secara matang agar pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan optimal," ujar Anggiat.

Ia menjelaskan, berdasarkan kondisi saat ini, sebagian besar personel diproyeksikan akan bergabung dengan Dinas Damkar setelah pemisahan dilakukan. Sementara itu, BPBD diperkirakan hanya memiliki sekitar 43 pegawai, sehingga diperlukan langkah-langkah strategis untuk memenuhi kebutuhan organisasi ke depan.

Menanggapi hal tersebut, Kepala BPBD Kota Tangerang, Mahdiar, menyampaikan bahwa pemerintah daerah akan melakukan koordinasi lintas perangkat daerah untuk menyusun langkah pemenuhan kebutuhan SDM. Di sisi lain, ia memastikan kesiapan sarana dan prasarana dinilai telah memadai untuk mendukung operasional kedua instansi setelah pemisahan.

"Kebutuhan SDM akan kami bahas bersama BKPSDM, Bagian Organisasi, dan BPKAD untuk mencari solusi terbaik. Apa pun ketentuan regulasinya, tentu akan kami laksanakan," kata Mahdiar.

Melalui pembahasan Raperda ini, DPRD Kota Tangerang berkomitmen memastikan proses pemisahan BPBD dan Damkar berjalan secara terencana dengan mempertimbangkan kesiapan kelembagaan, kecukupan sumber daya manusia, serta keberlanjutan pelayanan publik. Diharapkan regulasi yang dihasilkan mampu mendukung tata kelola pemerintahan yang semakin efektif sekaligus memperkuat kualitas layanan penanggulangan bencana dan pemadam kebakaran bagi masyarakat. ■ SIN



FOTO: ANANDA ADINING PUTRA

DPRD KOTA TANGERANG

80 Tahun Mengabdi
POLRI
Untuk Masyarakat

DIRGAHAYU
BHAYANGKARA

Polri Presisi, mengabdi untuk negeri, menjaga keamanan, melayani masyarakat, dan menjadi pelindung bagi seluruh rakyat Indonesia.

1 JULI 2026



Selamat Jalan

H. Rusdi, S.Th.I., M.S.M.

Rusdi lahir di Tangerang pada 4 April 1979. Politisi dari Fraksi Partai Golkar tersebut dipercaya menjabat sebagai Ketua DPRD Kota Tangerang periode 2024-2029 setelah resmi dilantik pada 30 September 2024. Sebelum menjadi Ketua DPRD, almarhum merupakan Anggota DPRD Kota Tangerang periode 2019-2024 yang bertugas di Komisi IV. Selama menjadi wakil rakyat, beliau mewakili Daerah Pemilihan (Dapil) I yang meliputi Kecamatan Tangerang dan Kecamatan Karawaci.

Ia juga pernah menerima penghargaan sebagai Tokoh Buruh Kota Tangerang pada tahun 2026 yang diberikan dalam acara Peringatan Hari Buruh (May Day). Penghargaan ini merupakan bentuk apresiasi atas dedikasi, komitmen, dan dukungan penuh beliau terhadap kesejahteraan para pekerja

Kepergiannya, menjadi kehilangan yang mendalam bagi seluruh pimpinan dan anggota DPRD, Sekretariat DPRD, Pemerintah Kota Tangerang, serta masyarakat Kota Tangerang. Semasa hidupnya, Rusdi dikenal sebagai sosok pemimpin yang mengedepankan musyawarah, menjunjung tinggi amanah rakyat, serta memiliki komitmen kuat dalam memperjuangkan kepentingan masyarakat melalui fungsi legislasi, penganggaran, dan pengawasan DPRD.

Dalam kepemimpinannya sebagai Ketua DPRD Kota Tangerang, ia senantiasa mendorong terwujudnya sinergi yang kuat antara DPRD dan Pemerintah Kota Tangerang dalam menghadirkan kebijakan yang berpihak kepada masyarakat. Berbagai agenda strategis daerah, mulai dari pembahasan peraturan daerah, penguatan fungsi pengawasan, hingga pengawalan pembangunan dan pelayanan publik, menjadi perhatian yang terus ia kawal bersama seluruh unsur DPRD.

Atas nama keluarga besar DPRD Kota Tangerang, seluruh pimpinan, anggota DPRD, Sekretaris DPRD beserta jajaran menyampaikan belasungkawa yang sedalam-dalamnya.

Dedikasi, integritas, dan pengabdian Rusdi selama memimpin DPRD Kota Tangerang akan menjadi teladan bagi seluruh insan DPRD dalam menjalankan amanah sebagai wakil rakyat. Semangatnya dalam memperjuangkan kepentingan masyarakat akan senantiasa menjadi bagian dari perjalanan pembangunan Kota Tangerang. ■ SIN/DSW



Momen kebersamaan Wakil Ketua I DPRD Kota Tangerang, Andri S. Permana bersama Ketua DPRD Kota Tangerang, Rusdi saat rapat di Ruang Rapat Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kota Tangerang.

Sosok Rusdi di Mata Andri S. Permana

Pemimpin yang Mengedepankan Kebersamaan

KEPERGIAN Ketua DPRD Kota Tangerang, Rusdi, pada Minggu, 19 Juli 2026, meninggalkan duka mendalam bagi keluarga besar DPRD Kota Tangerang. Wakil Ketua I DPRD Kota Tangerang, Andri S. Permana, mengenang Rusdi sebagai sosok pemimpin yang mampu membangun kebersamaan dan menciptakan semangat kolektif dalam menjalankan tugas-tugas kedewanan.

Menurut Andri, selama memimpin DPRD Kota Tangerang, Rusdi memiliki kemampuan membagi peran dan tanggung jawab secara proporsional kepada seluruh unsur pimpinan maupun anggota DPRD. Kepemimpinan tersebut dinilai mampu menciptakan keseimbangan dalam pelaksanaan fungsi-fungsi parlemen.

"Dalam teori *balance of power*, keseimbangan kekuatan hanya dapat diwujudkan melalui distribusi kekuatan. Beliau mampu menjalankan itu dengan sangat baik. Beliau mendistribusikan tugas, tanggung jawab, dan ruang kepada semua pihak sehingga semangat kolektif kolegial di DPRD benar-benar terasa," ujarnya, Senin (20/7/26).

Ia menuturkan, Rusdi tidak pernah memusatkan peran kepemimpinan hanya pada dirinya sendiri. Sebaliknya, seluruh anggota DPRD diberikan kesempatan yang sama untuk berkontribusi sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing.

Menurutnya, pola kepemimpinan tersebut membuat hubungan antarpimpinan dan anggota DPRD berjalan harmonis serta berdampak pada meningkatnya kualitas pelayanan kepada masyarakat Kota Tangerang. Semangat kebersamaan yang dibangun almarhum menjadi salah satu fondasi penting dalam menjalankan fungsi legislasi, penganggaran, dan pengawasan.

Andri berharap nilai-nilai kepemimpinan yang ditunjukkan Rusdi dapat menjadi teladan bagi generasi muda maupun para pemimpin di masa mendatang. Ia menilai, kemampuan merangkul banyak pihak dalam menyelesaikan persoalan merupakan karakter yang patut diwariskan.

"Beliau selalu melibatkan banyak orang dalam menyelesaikan berbagai persoalan di Kota Tangerang. Filosofi kepemimpinan seperti inilah yang harus menjadi teladan bagi generasi penerus," tutupnya. ■ SIN



FOTO: ANANDA ADINING PUTRA

Sosok Rusdi di Mata Arief Wibowo

Dedikasi Rusdi akan Terus Menjadi Inspirasi

KEPERGIAN Ketua DPRD Kota Tangerang, Rusdi, pada Minggu 19 Juli 2026, meninggalkan duka mendalam bagi jajaran pimpinan dan anggota DPRD Kota Tangerang. Wakil Ketua II DPRD Kota Tangerang, Arief Wibowo, menyampaikan bahwa Rusdi merupakan sosok pemimpin yang memberikan keteladanan melalui komitmen, dedikasi, dan loyalitas dalam mengemban amanah.

Menurut Arief, selama memimpin DPRD Kota Tangerang, Rusdi selalu mengedepankan semangat kebersamaan dalam menjalankan roda organisasi. Kepemimpinan tersebut mampu menciptakan suasana kerja yang harmonis dan membuat seluruh anggota DPRD merasa menjadi bagian dari satu keluarga.

“Beliau adalah sosok pemimpin yang memberikan keteladanan dalam komitmen, dedikasi terhadap amanah, serta loyalitas kepada institusi. Yang paling saya rasakan, beliau selalu mengedepankan semangat kebersamaan sehingga kami yang dipimpin merasa nyaman dan diayomi,” ujarnya, Selasa (21/7/26).

Ia mengatakan, hubungan yang dibangun Rusdi tidak berhenti pada ruang-ruang formal kedewanan. Ia juga aktif membangun komunikasi melalui berbagai forum informal yang mempererat hubungan antarpimpinan dan anggota DPRD.

Menurutnya, pendekatan tersebut membuat ikatan persaudaraan di lingkungan DPRD Kota Tangerang tumbuh semakin kuat. Kebersamaan yang terjalin menjadi modal penting dalam menghadapi berbagai dinamika selama menjalankan tugas sebagai wakil rakyat.

Arief juga mengaku banyak belajar dari sosok Rusdi, terutama dalam menyikapi berbagai persoalan dengan penuh kedewasaan. Berbekal pengalaman, pengetahuan, dan kematangan emosional, almarhum dinilai mampu menjaga soliditas internal DPRD sekaligus membangun komunikasi yang baik dengan masyarakat.

“Saya banyak belajar dari beliau. Dengan pengalaman, pengetahuan, dan kematangan emosional yang beliau miliki, Beliau mampu mengelola berbagai dinamika di internal DPRD sehingga kebersamaan tetap terjaga. Pada saat yang sama, beliau juga mampu mengelola dinamika yang berkembang di masyarakat melalui peran kedewanan,” katanya.

Arief menilai sosok seperti Rusdi merupakan figur yang sulit tergantikan. Meski demikian, nilai-nilai kepemimpinan yang telah diwariskan almarhum diyakini akan terus menjadi inspirasi bagi seluruh anggota DPRD dalam menjalankan amanah untuk melayani masyarakat.

“Saya merasa sangat kehilangan beliau dan tidak mudah mencari sosok seperti beliau. Mudah-mudahan seluruh dedikasi, loyalitas, kontribusi, dan kerja keras yang beliau persembahkan untuk masyarakat Kota Tangerang menjadi amal jariah yang pahalanya terus mengalir. Semoga apa yang beliau teladankan menjadi pelajaran bagi kita semua untuk melanjutkan jalan perjuangan yang telah beliau contohkan,” tutup Arief. ■ **SIN/DSW**

TAHLILAN 7 HARI

FOTO: MUHAMAD DIMAS KHOIRO/MUHAMMAD IQBAL









Sosok Rusdi di Mata Turidi Susanto

Rusdi Sosok Humanis dan Pemersatu DPRD Kota Tangerang

KEPERGIAN Ketua DPRD Kota Tangerang, Rusdi, yang wafat pada Minggu (19/7/26) malam, meninggalkan duka mendalam bagi keluarga besar DPRD Kota Tangerang. Sosoknya dikenang sebagai pemimpin yang humanis, terbuka, serta mampu membangun kebersamaan di tengah keberagaman.

Wakil Ketua III DPRD Kota Tangerang, Turidi Susanto, mengenang almarhum sebagai pemimpin yang selalu mengedepankan komunikasi, kebersamaan, dan solusi dalam menjalankan roda organisasi.

"Saya kira Rusdi adalah salah satu tokoh yang mempunyai karakteristiknya sangat humanis dan gampang berkomunikasi. Sepanjang bersahabatan dengan beliau, saya melihat ketika ada persoalan dan ketika ada pembahasan di DPRD pun, almarhum memberikan sebuah solusi-solusi positif dan mampu bisa menjadi perekat bersama dengan anggota lainnya," ujar Turidi saat dihubungi, Senin (20/7/26).

Menurutnya, selama memimpin DPRD Kota Tangerang, Rusdi mampu menumbuhkan budaya kerja yang kolektif tanpa memandang perbedaan latar belakang politik. Semangat persaudaraan yang dibangun almarhum menjadi fondasi kuat dalam menjaga kekompakan lembaga demi kepentingan masyarakat.

Turidi juga mengenang kedekatan almarhum dengan berbagai elemen masyarakat. Rusdi dinilai selalu membuka ruang dialog dan menerima aspirasi dari berbagai kalangan, mulai dari organisasi keagamaan, kepemudaan hingga kemahasiswaan.

"Saya melihat Rusdi juga cukup baik terhadap seluruh konstituen. Banyak sekali organisasi, keagamaan, organisasi kemahasiswaan dan organisasi kepemudaan. Beliau berdiskusi, menampung aspirasi dan saya kira sangat baik," tutup Turidi. ■ **SIN/DSW**



FOTO: ANANDA ADINING PUTRA

Momen kebersamaan Wakil Ketua III DPRD Kota Tangerang, Turidi Susanto bersama Ketua DPRD Kota Tangerang, Rusdi.

Sachrudin: Rusdi Sosok Rendah Hati dan Berdedikasi untuk Kota Tangerang

FOTO: ANANDA ADINING PUTRA



Kenangan bersama Wali Kota Kota Tangerang, Sachrudin bersama Ketua DPRD Kota Tangerang, Rusdi setelah mengikuti salat tarawih bareng (21/3/2026) lalu.

WALI Kota Tangerang, Sachrudin menyampaikan duka mendalam atas wafatnya Ketua DPRD Kota Tangerang, Rusdi. Di mata Sachrudin, almarhum merupakan sosok pemimpin yang rendah hati, memiliki komitmen kuat dalam membangun Kota Tangerang, serta selalu mengedepankan dialog dalam menyelesaikan berbagai persoalan.

Sachrudin mengatakan, selama menjalin hubungan sebagai mitra antara eksekutif dan legislatif, dirinya kerap berdiskusi dengan Rusdi mengenai berbagai isu pembangunan dan kepentingan masyarakat. Menurutnya, almarhum memiliki perhatian besar terhadap kemajuan Kota Tangerang.

"Beliau orang yang rendah hati, tidak pernah temperamen. Beliau selalu adem mengatasi persoalan. Beberapa jam sebelum beliau meninggal kami masih sempat bertemu, berbicara tentang kota ini, masyarakat, dan pengkaderan generasi muda di Kota Tangerang. Itu yang sangat berkesan bagi saya," ujar Sachrudin.

Ia menilai kepergian Rusdi meninggalkan duka yang mendalam bagi banyak pihak. Meski demikian, Sachrudin berharap nilai-nilai kebaikan yang telah diwariskan almarhum tetap hidup dan menjadi inspirasi bagi masyarakat dalam membangun diri, keluarga, maupun Kota Tangerang.

Sachrudin mengungkapkan, pertemuan terakhir mereka berlangsung hanya beberapa jam sebelum Rusdi berpulang. Menurutnya, saat itu tidak terlihat adanya tanda-tanda yang mengarah pada kepergian almarhum sehingga kabar duka tersebut menjadi kehilangan yang sangat mengejutkan.

Selain dikenal sebagai tokoh politik, Sachrudin menilai Rusdi memiliki dedikasi yang luas terhadap kehidupan bermasyarakat. Perhatian almarhum kepada generasi muda, organisasi kepemudaan, organisasi sosial, hingga organisasi keagamaan menjadi bagian dari pengabdiannya untuk kemajuan Kota Tangerang.

"Loyalitasnya luar biasa, dedikasinya juga luar biasa. Perhatian beliau kepada generasi muda, organisasi kemasyarakatan, organisasi sosial, bahkan organisasi keagamaan terus mendorong semangat perjuangan untuk membangun kota ini dan masyarakat Kota Tangerang," katanya.

Di akhir penyampaiannya, Sachrudin mengajak seluruh masyarakat untuk mendoakan almarhum agar memperoleh tempat terbaik di sisi Allah SWT. Ia juga berharap keluarga yang ditinggalkan diberikan ketabahan, kekuatan, dan keikhlasan. ■ SIN



FOTO: ANANDA ADINING PUTRA

Wali Kota Kota Tangerang, Sachrudin bersama Alm. Ketua DPRD Kota Tangerang, Rusdi setelah salat Idulfitri bareng, (21/3/2026) lalu.



FOTO: ANANDA ADINING PUTRA







KOMISI I

Sidak Berbuah Kesepakatan, Akses Jalan RW 05 Poris Gaga Dibuka Kembali

DPRD Kota Tangerang berhasil memfasilitasi penyelesaian permasalahan penutupan akses jalan di RW 05, Kelurahan Poris Gaga, Kecamatan Batuceper, yang dilakukan oleh pihak pengembang PT. Poris Indah Graha. Kesepakatan tersebut dicapai saat Wakil Ketua III DPRD Kota Tangerang, Turidi Susanto, bersama Komisi I dan anggota DPRD Daerah Pemilihan (Dapil) III melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke lokasi proyek, Jumat (26/6/26).

Dalam sidak tersebut, seluruh pihak yang berkepentingan hadir dan menyepakati pembukaan kembali akses jalan yang sebelumnya ditutup, sekaligus pembangunan jalur baru selebar empat meter sebagai akses bagi warga.

"*Alhamdulillah* hari ini persoalan penutupan akses jalan berhasil diselesaikan. Salah satu kesepakatannya adalah membuka kembali akses yang ditutup dan membuat jalur selebar empat meter agar masyarakat di belakang Blok Ambon tetap memiliki akses yang layak," ujar Turidi.

Ia juga berharap Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten, dan Pemerintah Kota (Pemkot) Tangerang dapat mendukung pembangunan jalur alternatif di sisi rel kereta guna meningkatkan konektivitas kawasan.

Sementara itu, Ketua Komisi I DPRD Kota Tangerang, Junadi menegaskan, bahwa berdasarkan hasil pengawasan di lapangan, PT. Poris Indah Graha belum melengkapi sejumlah dokumen perizinan yang menjadi persyaratan pelaksanaan pembangunan.

SEPAKATI: Wakil Ketua III DPRD Kota Tangerang, Turidi Susanto bersama Ketua Komisi I, Junadi beserta anggota Komisi I saat melakukan sidak ke lokasi proyek, Jumat (26/6/26). Seluruh pihak yang berkepentingan hadir dan menyepakati pembukaan kembali akses jalan yang sebelumnya ditutup, sekaligus pembangunan jalur baru selebar empat meter sebagai akses bagi warga.

"Pengembang baru memiliki *site plan* tahun 2011. Sementara Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), KRK, Andalalin, kajian banjir, maupun AMDAL lingkungan belum dipenuhi. Selama persyaratan tersebut belum lengkap, seharusnya belum ada kegiatan pembangunan di kawasan perumahan," tegas Junadi.

Ia juga meminta pihak pengembang maupun Pemkot Tangerang melalui OPD terkait untuk mempercepat proses perizinan tanpa mengabaikan aspek perlindungan lingkungan dan kepentingan masyarakat.

"Kehadiran sebuah perumahan harus memberikan manfaat bagi masyarakat sekitar dan jangan sampai mengurangi hak-hak warga akibat adanya pembangunan," lanjutnya.

Ketua RW 05 Kelurahan Poris Gaga, Habib, mengapresiasi langkah cepat DPRD Kota Tangerang dalam memediasi penyelesaian persoalan yang telah berlangsung cukup lama.

"Semoga dengan terbukanya akses jalan ini masyarakat bisa kembali tenang, nyaman, dan persoalan yang selama ini terjadi benar-benar selesai," ungkap Habib. ■ SIN/DSW





FOTO: ANANDA ADINING PUTRA

Gesuri Mesias Bintang Merah, Sekretaris Komisi II DPRD Kota Tangerang.

KOMISI II

Wujudkan MPLS Ramah dan Bebas Perundungan

DPRD Kota Tangerang menegaskan bahwa pelaksanaan Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS) harus kembali pada tujuan utamanya, yakni membantu peserta didik baru mengenal lingkungan sekolah secara positif, aman, dan menyenangkan.

Sekretaris Komisi II DPRD Kota Tangerang, Gesuri Mesias Bintang Merah mengatakan, MPLS merupakan momentum bagi siswa untuk beradaptasi dengan lingkungan belajar baru, mulai dari mengenal sarana dan prasarana sekolah, tenaga pendidik, hingga berbagai kegiatan yang dapat mendukung proses pendidikan.

"Pelaksanaan MPLS di seluruh sekolah harus berjalan sesuai tujuan awalnya, yaitu memperkenalkan lingkungan sekolah kepada peserta didik baru. Jangan sampai ada praktik yang menyimpang dari esensi MPLS, terlebih yang mengarah pada perundungan atau bentuk kekerasan," ujarnya saat ditemui, Selasa (14/7/26).

Ia juga menegaskan, Komisi II berkomitmen mengawal pelaksanaan MPLS agar berjalan sesuai ketentuan. Serta siap hadir bersama masyarakat apabila ditemukan laporan atau keluhan terkait pelaksanaan MPLS yang tidak sejalan dengan nilai-nilai pendidikan.

"Apabila terdapat keluhan atau praktik yang menyalahi inti sari MPLS, kami siap hadir dan mendorong agar persoalan tersebut segera ditindaklanjuti demi melindungi hak-hak peserta didik," tegasnya.

Di akhir penyampaiannya, Gesuri mengajak seluruh pihak, mulai dari sekolah, guru, orang tua, hingga siswa untuk bersama-sama menciptakan lingkungan belajar yang aman, nyaman, dan bebas dari perundungan.

"Mari kita jadikan sekolah sebagai rumah kedua bagi seluruh generasi bangsa. Lingkungan belajar yang aman, nyaman, dan saling menghargai akan menjadi fondasi penting dalam mencetak peserta didik yang berkualitas, khususnya di Kota Tangerang," tutupnya. ■ **SIN/DSW**



SUMBER : DINAS KOMINFO KOTA TANGERANG

KOMISI II

Peran Keluarga Cegah Kekerasan terhadap Anak dan Perempuan

“Dalam peringatan Hari Keluarga Nasional, saya mengajak seluruh keluarga untuk kembali menempatkan rumah sebagai tempat yang paling aman bagi anak dan perempuan. Pencegahan kekerasan harus dimulai dari hal-hal sederhana, seperti membangun komunikasi yang terbuka, menanamkan nilai saling menghormati, dan menyelesaikan persoalan tanpa kekerasan.



FOTO: ANANDA ADINING PUTRA

Natalie Marbun, Wakil Ketua Komisi II DPRD Kota Tangerang.

MOMENTUM Hari Keluarga Nasional menjadi pengingat penting bagi seluruh elemen masyarakat untuk memperkuat peran keluarga sebagai lingkungan pertama yang aman, nyaman, dan penuh kasih sayang bagi anak serta perempuan.

Wakil Ketua Komisi II DPRD Kota Tangerang, Natalie Marbun menegaskan, bahwa upaya pencegahan kekerasan harus dimulai dari lingkungan keluarga melalui komunikasi yang sehat, saling menghormati, dan penyelesaian setiap persoalan tanpa kekerasan.

"Dalam peringatan Hari Keluarga Nasional, saya mengajak seluruh keluarga untuk kembali menempatkan rumah sebagai tempat yang paling aman bagi anak dan perempuan. Pencegahan kekerasan harus dimulai dari hal-hal sederhana, seperti membangun komunikasi yang terbuka, menanamkan nilai saling menghormati, dan menyelesaikan persoalan tanpa kekerasan," ujar Natalie saat dihubungi, Senin (29/6/26)

Politisi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) tersebut menilai, bahwa langkah *preventif* merupakan kunci utama dalam menekan angka kekerasan terhadap anak dan perempuan. Menurutnya, membangun ketahanan keluarga melalui edukasi dan peningkatan literasi menjadi investasi penting dalam menciptakan lingkungan yang aman dan sehat.

"Kita harus memperkuat literasi keluarga, memberikan edukasi kepada orang tua, serta memastikan setiap anak dan perempuan merasa aman untuk berbicara ketika mengalami atau menyaksikan tindak kekerasan," katanya.

Natalie juga mengajak seluruh pemangku kepentingan, mulai dari pemerintah, lembaga pendidikan, komunitas, hingga masyarakat, untuk bersama-sama membangun kepedulian terhadap perlindungan anak dan perempuan. Ia menegaskan bahwa kekerasan dalam rumah tangga tidak boleh lagi dianggap sebagai persoalan yang bersifat pribadi, melainkan menjadi tanggung jawab bersama untuk dicegah dan ditangani.

"Saya berharap Hari Keluarga Nasional menjadi momentum untuk memperkuat kepedulian bersama. Tidak boleh ada lagi anggapan bahwa kekerasan dalam rumah tangga adalah urusan pribadi. Melindungi anak dan perempuan adalah tanggung jawab kita semua demi terwujudnya keluarga yang berkualitas dan generasi yang tumbuh dengan rasa aman serta penuh percaya diri," tutupnya.

Melalui peringatan Hari Keluarga Nasional, DPRD Kota Tangerang terus mendorong terbangunnya keluarga yang tangguh sebagai fondasi utama dalam menciptakan masyarakat yang harmonis, sekaligus mendukung terwujudnya Kota Tangerang yang ramah bagi anak dan perempuan. ■ **SIN/DSW**

FOTO: ANANDA ADINING PUTRA



Ketua Komisi III DPRD Kota Tangerang, Sumarti.

> **BUMD tidak hanya berorientasi pada pelayanan, tetapi juga harus menjadi entitas bisnis yang sehat, profesional, dan mampu menghasilkan dividen berkelanjutan melalui penerapan tata kelola perusahaan yang baik atau *Good Corporate Governance.***

KOMISI III

Evaluasi Kinerja BUMD, Dorong Peningkatan PAD

KOMISI III DPRD Kota Tangerang mendorong Pemerintah Kota (Pemkot) Tangerang melakukan transformasi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) secara menyeluruh guna meningkatkan kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD), sekaligus memperkuat kualitas pelayanan publik kepada masyarakat.

Ketua Komisi III DPRD Kota Tangerang, Sumarti, mengatakan BUMD harus mampu menjalankan fungsi pelayanan publik sekaligus berkembang sebagai entitas bisnis yang sehat dan profesional.

"BUMD tidak hanya berorientasi pada pelayanan, tetapi juga harus menjadi entitas bisnis yang sehat, profesional, dan mampu menghasilkan dividen berkelanjutan melalui penerapan tata kelola perusahaan yang baik atau *Good Corporate Governance*," ujarnya saat dihubungi, Selasa (21/7/26).

Sumarti menjelaskan, evaluasi kinerja BUMD pada semester pertama tahun 2026 menjadi langkah awal untuk mengukur capaian perusahaan daerah dalam memenuhi target Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) serta target dividen yang telah ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Menurutnya, evaluasi tersebut merupakan bagian dari fungsi pengawasan Komisi III DPRD Kota Tangerang yang dilakukan secara preventif. Dengan evaluasi sejak semester pertama, berbagai potensi permasalahan dapat segera diidentifikasi dan ditangani tanpa harus menunggu hingga berakhirnya tahun anggaran.

"Evaluasi semester pertama ini merupakan bagian dari fungsi pengawasan preventif, sehingga permasalahan dapat diatasi sejak awal dan tidak perlu menunggu hingga akhir tahun anggaran," jelasnya.

Sumarti menyampaikan, secara umum kontribusi dividen BUMD terhadap PAD Kota Tangerang saat ini masih relatif kecil, yakni kurang dari satu persen dari total target PAD Kota Tangerang yang mencapai sekitar Rp3,038 triliun. Meski demikian, kontribusi tersebut tetap dinilai penting karena menjadi salah satu sumber pendapatan daerah yang relatif stabil.

Adapun target dividen BUMD pada 2026, yaitu BUMD sektor keuangan melalui Bank BJB ditargetkan memberikan kontribusi lebih dari Rp14 miliar. Sementara itu, BUMD sektor aneka usaha, PT Tangerang Nusantara Global (PT TNG), ditargetkan menyumbang sekitar Rp1,8 miliar. Sedangkan Perumda Tirta Benteng sebagai BUMD sektor air minum ditargetkan memberikan kontribusi sebesar Rp5,5 miliar.

Jika dibandingkan dengan target pada 2025, terdapat peningkatan target dividen pada sejumlah BUMD. Bank BJB yang pada 2025 ditargetkan memberikan kontribusi sekitar Rp11,4 miliar meningkat menjadi lebih dari Rp14 miliar pada 2026. Sementara PT TNG meningkat dari target sekitar Rp600 juta pada 2025 menjadi sekitar Rp1,8 miliar pada 2026. Adapun target dividen Perumda Tirta Benteng tetap sebesar Rp5,5 miliar.

Sumarti menilai peningkatan target tersebut masih realistis untuk dicapai sepanjang diiringi dengan peningkatan efisiensi operasional, penerapan tata kelola perusahaan yang baik, serta pengembangan lini usaha yang mampu menghasilkan laba secara berkelanjutan.

"Target tersebut masih realistis, asalkan dibarengi efisiensi operasional, tata kelola yang baik, dan pengembangan usaha yang mampu menghasilkan laba secara berkelanjutan," pungkasnya. ■ SIN/DSW

KOMISI III

BPBD Harus Tingkatkan Mitigasi Kemarau dan Ketahanan Pangan

DPRD Kota Tangerang mengimbau Pemerintah Kota (Pemkot) Tangerang meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi potensi dampak musim kemarau. Imbauan tersebut ditujukan kepada Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) untuk memperkuat langkah mitigasi bencana, serta Dinas Ketahanan Pangan (DKP) agar memastikan ketersediaan pangan tetap aman bagi masyarakat.

Wakil Ketua Komisi III DPRD Kota Tangerang, Holiludin, mengatakan BPBD perlu mengantisipasi berbagai potensi bencana yang kerap terjadi saat musim kemarau, seperti kekeringan, krisis air bersih, serta kebakaran lahan dan permukiman.

"Kami mengimbau BPBD Kota Tangerang agar meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi potensi kekeringan, krisis air bersih, maupun kebakaran lahan. Langkah mitigasi harus dilakukan sejak dini agar masyarakat tetap merasa aman dan dampaknya bisa diminimalkan," ujarnya saat dihubungi, Sabtu (11/7/26).



SUMBER : DINAS KOMINFO KOTA TANGERANG

(Arsip) Petugas memantau dashboard Command Center BPBD Kota Tangerang, Provinsi Banten.

Holiludin menambahkan, BPBD juga perlu melakukan pemetaan wilayah yang berpotensi terdampak, menyiapkan personel beserta sarana pendukung, serta memperkuat koordinasi dengan instansi terkait agar penanganan dapat dilakukan secara cepat apabila terjadi kondisi darurat.

Selain penguatan mitigasi bencana, Holiludin meminta DKP memastikan ketersediaan pangan di Kota Tangerang tetap terjaga selama musim kemarau berlangsung.

> **Kami mengimbau BPBD Kota Tangerang agar meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi potensi kekeringan, krisis air bersih, maupun kebakaran lahan. Langkah mitigasi harus dilakukan sejak dini agar masyarakat tetap merasa aman dan dampaknya bisa diminimalkan.**
>
> **Holiludin**
> Wakil Ketua Komisi III DPRD Kota Tangerang



"DKP harus memantau ketersediaan stok dan stabilitas harga kebutuhan pokok. Jangan sampai musim kemarau berdampak pada pasokan pangan ataupun memicu kenaikan harga yang memberatkan masyarakat," katanya.

Menurutnya, koordinasi antarperangkat daerah menjadi faktor penting dalam menghadapi musim kemarau agar seluruh potensi dampak dapat diantisipasi secara menyeluruh, mulai dari aspek kebencanaan hingga ketahanan pangan.

"Kami berharap seluruh perangkat daerah dapat bersinergi dan bergerak cepat dalam mengantisipasi musim kemarau. Dengan persiapan yang matang, pelayanan kepada masyarakat dapat tetap berjalan dengan baik dan kebutuhan dasar masyarakat tetap terpenuhi," tutupnya. ■ SIN



FOTO: ANANDA ADINING PUTRA

Porseni Basket SMP

Andri: Perkuat Pembinaan Atlet dan Karakter Generasi Muda

KETUA Perbasi Kota Tangerang yang juga Wakil Ketua I DPRD Kota Tangerang, Andri S. Permana, membuka pelaksanaan Pekan Olahraga dan Seni (Porseni) Basket tingkat SMP yang memasuki penyelenggaraan keempat, di GOR Dimyati, Senin (20/7/26). Kegiatan yang merupakan hasil kolaborasi Perbasi Kota Tangerang dengan Dinas Pendidikan ini diikuti 90 tim dari berbagai SMP se-Kota Tangerang sebagai wadah pembinaan atlet usia dini sekaligus mendorong perkembangan olahraga basket di daerah.

Pelaksanaan Porseni tahun ini berlangsung di tengah suasana duka atas wafatnya Ketua DPRD Kota Tangerang, Rusdi. Meski demikian, Andri menegaskan kegiatan tetap dilaksanakan sebagai bentuk penghormatan sekaligus meneruskan semangat almarhum yang selama ini memberikan dukungan terhadap pertumbuhan dan perkembangan bola basket di Kota Tangerang.

"Di tengah suasana duka ini, kami tetap menjalankan Porseni karena inilah semangat yang selalu ditunjukkan almarhum Ketua DPRD, Bapak Rusdi. Beliau selama ini menjadi pendukung utama bagi pertumbuhan dan perkembangan bola basket di Kota Tangerang," ungkapnya.

Ia menjelaskan, penyelenggaraan Porseni selama tiga tahun terakhir telah memberikan dampak nyata terhadap pembinaan atlet basket. Kompetisi tingkat SMP yang berkesinambungan kemudian dilanjutkan dengan pembinaan di tingkat SMA, sehingga melahirkan regenerasi atlet yang mampu bersaing di berbagai ajang.

"Tiga tahun terakhir pelaksanaan Porseni tingkat SMP telah memberikan dampak besar bagi perkembangan bola basket di Kota Tangerang. Dari pembinaan yang berkelanjutan ini, kita berhasil meraih satu medali emas dan dua medali perunggu. Itu merupakan buah dari kontinuitas dan konsistensi pembinaan yang kami lakukan," lanjut Andri.

Menurut Andri, sistem pembinaan berjenjang tersebut menjadi modal penting bagi Kota Tangerang dalam mengembangkan prestasi basket. Ia menilai pola pembinaan seperti ini menjadi salah satu keunggulan yang belum banyak dimiliki daerah lain di Provinsi Banten. Ia juga menyampaikan apresiasi kepada Dinas Pendidikan, sekolah, pelatih, klub, serta seluruh pihak yang terus mendukung terselenggaranya Porseni setiap tahun.

Selain mengejar prestasi, Andri menegaskan bahwa basket juga memiliki peran penting dalam membentuk karakter generasi muda. Melalui olahraga, para pelajar didorong untuk membangun rasa percaya diri, kemampuan berkomunikasi, bersosialisasi, serta menghargai sesama.

"Orientasi basket di Kota Tangerang bukan hanya mengejar kemenangan. Kami ingin olahraga ini menjadi ruang pembentukan karakter, tempat anak-anak belajar percaya diri, bersosialisasi, berkomunikasi, menghargai teman, dan menghargai diri sendiri," ungkapnya.

Sebagai Wakil Ketua I DPRD Kota Tangerang, Andri memastikan DPRD akan terus mendukung pengembangan seluruh cabang olahraga, termasuk basket yang menurutnya mengalami pertumbuhan sangat pesat. Meningkatnya jumlah klub dan peminat basket perlu diimbangi dengan penyediaan fasilitas yang memadai agar pembinaan dapat berjalan optimal.

Ia mengatakan, DPRD terus berkoordinasi dengan Dinas Pemuda dan Olahraga untuk mendorong penyediaan lapangan basket berbasis kewilayahan. Dengan klub basket yang telah tersebar di 13 kecamatan, Andri berharap lapangan basket dapat hadir lebih dekat dengan lingkungan masyarakat sehingga semakin banyak anak muda memiliki akses untuk berlatih dan mengembangkan potensinya.

"Animo masyarakat terhadap basket terus meningkat. Sudah waktunya lapangan basket hadir di lingkungan masyarakat. Dengan begitu, basket akan semakin dekat dengan warga dan semakin banyak generasi muda yang dapat menyalurkan bakat serta potensinya," tutupnya. ■ SIN

Jelang Musim Penghujan

Arief: Normalisasi Saluran Air Harus Dipercepat

DPRD Kota Tangerang meminta Pemerintah Kota (Pemkot) Tangerang segera memanfaatkan musim kemarau untuk mempercepat normalisasi saluran air sebagai langkah mitigasi menghadapi musim penghujan. Upaya tersebut dinilai penting agar potensi banjir di sejumlah wilayah dapat diminimalkan melalui penanganan yang lebih efektif.

Wakil Ketua II DPRD Kota Tangerang, Arief Wibowo, mengatakan musim kemarau merupakan waktu yang tepat untuk melakukan pemetaan terhadap titik-titik yang memerlukan penanganan. Menurutnya, proses tersebut menjadi dasar dalam menentukan langkah normalisasi sekaligus memperkuat sistem tata air di Kota Tangerang.

"Informasi yang kami terima dari BMKG maupun BRIN menunjukkan potensi musim kemarau yang cukup panjang. Meski demikian, kita juga harus tetap mengantisipasi perubahan iklim yang bisa membuat kondisi cuaca berubah sewaktu-waktu. Karena itu, momen musim kemarau ini harus dimanfaatkan untuk melakukan pemetaan titik-titik yang membutuhkan penanganan agar mampu menjadi bagian dari sistem tata air dalam memitigasi risiko banjir," ujarnya, Jumat (24/7/26).

Ia menjelaskan, setelah pemetaan dilakukan, pemerintah dapat menyusun analisis kebutuhan, baik dari sisi pekerjaan maupun sumber daya yang diperlukan. Menurutnya, pelaksanaan normalisasi saat musim kemarau juga lebih efektif karena kondisi debit air lebih rendah sehingga pekerjaan di lapangan dapat berjalan lebih optimal.

Arief menilai hasil pemetaan tersebut juga dapat menjadi dasar dalam penyusunan kebutuhan anggaran, terutama menjelang pembahasan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Tahun Anggaran 2027 serta APBD Perubahan.



"Saya mendorong agar kebutuhan normalisasi yang sudah dipetakan segera ditindaklanjuti sehingga bisa kita dorong penganggarannya pada perubahan anggaran terdekat. Dengan memanfaatkan musim kemarau ini, kita memiliki waktu yang lebih baik untuk menyelesaikan pekerjaan sehingga saat musim penghujan datang, Kota Tangerang sudah lebih siap menghadapi potensi banjir," tutupnya. ■ SIN



SUMBER : KECAMATAN LARANGAN

Petugas DPUPR Kota Tangerang menggunakan alat berat melakukan normalisasi Kali Cantiga Puri Beta 1, Kelurahan Larangan Utara, Kecamatan Larangan, Kota Tangerang, Provinsi Banten.

Festival Cisadane

Peringkat 125 di Kharisma Event Nusantara

DPRD Kota Tangerang mengapresiasi masuknya Festival Cisadane dalam jajaran 125 event yang terpilih dalam Kharisma Event Nusantara (KEN) 2026 oleh Kementerian Pariwisata. Capaian tersebut dinilai menjadi bentuk pengakuan atas daya saing Festival Cisadane sekaligus motivasi untuk terus meningkatkan kualitas penyelenggaraan event tahunan tersebut.

Wakil Ketua II DPRD Kota Tangerang, Arief Wibowo mengatakan, masuknya Festival Cisadane dalam jajaran 125 event KEN 2026 menjadi sebuah rekognisi dari pemerintah pusat terhadap potensi event daerah yang diselenggarakan di Kota Tangerang.

"Dari sekitar 800 event yang ada di seluruh Indonesia, kita masuk dalam jajaran 125. Saya kira dengan pengakuan ini menjadi motivasi buat kita untuk terus meningkatkan daya saing Festival Cisadane ke depan, yang utamanya adalah menangkap pengembangan ekonomi kreatif di Kota Tangerang," ujar Arief saat menghadiri Pembukaan Festival Cisadane 2026 di Bantaran Sungai Cisadane, Kota Tangerang, Rabu (22/7/2026) malam.

Arief menilai, capaian tersebut perlu menjadi momentum bagi Pemerintah Kota (Pemkot) Tangerang dan seluruh pemangku kepentingan untuk terus melakukan evaluasi dan pengembangan Festival Cisadane secara berkelanjutan. Menurutnya, festival ini harus mampu memberikan dampak lebih luas, khususnya terhadap pertumbuhan ekonomi kreatif di Kota Tangerang.

Ia juga mendorong agar pengembangan ekonomi kreatif di Kota Tangerang dapat diselaraskan dengan Rencana Induk Pengembangan Ekonomi Kreatif Nasional yang telah diterbitkan Kementerian Ekonomi Kreatif.

"Ke depan kita perlu menelaah dan memastikan bahwa peta jalan yang ada dalam rencana induk tersebut kita adopsi dengan baik untuk memastikan bahwa pengembangan ekonomi kreatif benar-benar memberikan dampak bagi pertumbuhan ekonomi di Kota Tangerang, utamanya di tengah dinamika global hari ini," katanya.

Dengan evaluasi dan perbaikan yang dilakukan secara sistematis, Arief optimistis Festival Cisadane dapat terus meningkatkan daya saingnya dan menembus jajaran 10 besar event nasional pada tahun mendatang.

Sementara itu, Ketua Fraksi Nasdem DPRD Kota Tangerang, Mochamad Pandu, turut mengapresiasi perkembangan Festival Cisadane yang dinilainya terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun.

"Dari tahun ke tahun kita bertransformasi dari yang kurang baik menjadi baik, dari yang sudah baik menjadi lebih baik lagi. Jadi, kami dari DPRD akan terus mendukung Pemerintah Kota Tangerang, khususnya Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, untuk terus dapat menjalankan event-event ini," ungkap Pandu.

Pandu berharap Festival Cisadane tidak hanya menjadi kegiatan seremonial, tetapi juga mampu menjadi wadah untuk mengembangkan potensi budaya, pariwisata, dan ekonomi kreatif Kota Tangerang.

"Ini bukan hanya sekadar kegiatan seremonial, tapi kegiatan yang juga menumbuhkembangkan bagaimana di Kota Tangerang kita mempunyai nilai budaya yang sangat luar biasa. Kita mempunyai ikon Cisadane yang belum tentu dimiliki oleh daerah-daerah lainnya," pungkasnya. ■ SIN/DSW

FOTO: ANANDA ADINING PUTRA



TERIMA PIAGAM: Wali Kota Kota Tangerang, Sachrudin saat menerima piagam Kharisma Event Nusantara (KEN) 2026 oleh Kementerian Pariwisata, setelah masuknya Festival Cisadane dalam jajaran 125 dari 800 event, saat Pembukaan Festival Cisadane 2026 di Bantaran Sungai Cisadane, Kota Tangerang, Rabu (22/7/2026).

Persetujuan TPP PPPK Teknis

Tasril: Jangan Sampai PPPK Teknis, Merasa Menjadi ASN Kelas Dua

FOTO: ANANDA ADINING PUTRA



Anggota DPRD Kota Tangerang, Tasril Jamal (tengah) usai menerima aspirasi Forum ASN PPPK Teknis Kota Tangerang memperjuangkan peningkatan kesejahteraan aparatur di Ruang Fraksi PKB DPRD Kota Tangerang, Selasa (21/7/26).

ANGGOTA DPRD Kota Tangerang, Tasril Jamal, mendorong Pemerintah Kota (Pemkot) Tangerang bersama Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) RI segera menuntaskan proses persetujuan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) bagi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Langkah tersebut dinilai penting untuk memastikan tidak terjadi kesenjangan perlakuan di antara aparatur sipil negara (ASN).

Hal itu disampaikan Tasril usai menerima aspirasi Forum ASN PPPK Teknis Kota Tangerang yang memperjuangkan peningkatan kesejahteraan aparatur di Ruang Fraksi PKB DPRD Kota Tangerang, Selasa (21/7/26).

Menurut Tasril, terdapat dua aspirasi utama yang perlu menjadi perhatian pemerintah. Pertama, penyetaraan TPP bagi PPPK Teknis dengan PNS sesuai ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 6 Tahun 2021. Kedua, penyesuaian data pendidikan PPPK Teknis berdasarkan ijazah terakhir agar kompetensi dan jenjang pendidikan yang dimiliki dapat diakomodasi dalam sistem kepegawaian.

"Kalau tugas dan tanggung jawabnya sama, maka kesejahteraan juga harus diperlakukan secara adil. Jangan sampai PPPK Teknis merasa menjadi ASN kelas dua. Kami berharap TPP dapat disetarakan dengan PNS dan status pendidikan PPPK disesuaikan dengan ijazah terakhir yang mereka miliki," ujar Tasril.

Wakil Ketua Fraksi PKB DPRD Kota Tangerang itu mengapresiasi langkah Pemkot Tangerang yang telah mengajukan usulan TPP ASN Tahun Anggaran 2026 kepada Kemendagri. Berdasarkan hasil evaluasi pemerintah pusat, usulan tersebut dapat dilanjutkan dengan memprioritaskan pemberian TPP bagi 2.819 PPPK di lingkungan Pemerintah Kota Tangerang.

Karena itu, Tasril meminta Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah Kemendagri segera memberikan persetujuan agar hak-hak PPPK tidak terus tertunda akibat proses administrasi yang berkepanjangan.

"Kami mengapresiasi ikhtiar Pemkot yang sudah mengusulkan TPP bagi PPPK. Sekarang kami berharap Kemendagri segera memberikan persetujuan sehingga para PPPK, khususnya tenaga teknis, segera memperoleh kepastian. Jangan sampai birokrasi menghambat kesejahteraan ASN yang setiap hari memberikan pelayanan kepada masyarakat," tegasnya.

Tasril berharap perjuangan tersebut menjadi momentum untuk mewujudkan sistem manajemen ASN yang lebih adil, profesional, dan berbasis kompetensi. Menurutnya, peningkatan kesejahteraan serta pengakuan terhadap pendidikan terakhir PPPK merupakan bentuk penghargaan atas pengabdian pegawai sekaligus investasi untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik di Kota Tangerang. ■ SIN/

DPRD Apresiasi Festival Kali Sabi

Dorong Pelestarian Lingkungan dan UMKM



Anggota Komisi IV DPRD Kota Tangerang, Hendra Gunawan (kiri) bersama Ketua Banksasuci Foundation, Ade Yunus (kedua kiri), dan Wali Kota Kota Tangerang, Sachrudin berpose bareng saat acara penyelenggaraan Festival Kali Sabi dalam upaya melestarikan lingkungan sungai sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat melalui pemberdayaan UMKM di kawasan Kali Sabi, Kota Tangerang, Minggu (12/7/26).

DPRD Kota Tangerang mengapresiasi penyelenggaraan Festival Kali Sabi sebagai upaya melestarikan lingkungan sungai sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat melalui pemberdayaan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Kegiatan tersebut berlangsung di kawasan Kali Sabi, Kelurahan Uwung Jaya, Kecamatan Cibodas, Kota Tangerang, Minggu (12/7/26).

Anggota Komisi IV DPRD Kota Tangerang sekaligus Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda), Hendra Gunawan, mengatakan Festival Kali Sabi memberikan dampak positif, baik dalam menjaga kebersihan lingkungan maupun meningkatkan aktivitas ekonomi masyarakat melalui keterlibatan UMKM setempat.

"Saya sangat mengapresiasi kegiatan ini. Kalau bisa dilaksanakan satu bulan sekali. Selain membuat kali menjadi lebih bersih, UMKM tetap hidup dan masyarakat semakin antusias datang ke Kali Sabi," ujar Hendra.

Sementara itu, Menteri Lingkungan Hidup RI, Mohammad Jumhur Hidayat, menyampaikan dukungannya terhadap Festival Kali Sabi melalui program *Packaging Recovery Organization* (PRO) yang diinisiasi Kementerian Lingkungan Hidup. Melalui program tersebut, perusahaan penghasil limbah didorong untuk memberikan dukungan pendanaan kepada lembaga atau organisasi yang bergerak di bidang pelestarian lingkungan.

"Kami sudah menyiapkan program PRO. Nantinya kegiatan seperti ini dapat memanfaatkan dana kolektif dari perusahaan penghasil limbah untuk mendukung program kebersihan lingkungan seperti Festival Kali Sabi," jelas Jumhur.

Di sisi lain, Ketua Banksasuci Foundation, Ade Yunus, menjelaskan Festival Kali Sabi merupakan bagian dari dukungan terhadap program Pemerintah Kota Tangerang dan Pemerintah Pusat, di antaranya Program Kali Bersih (Prokasih) serta gerakan Tobat Ekologis yang mendorong penanaman dua miliar pohon.

Selain aksi bersih sungai, kegiatan tersebut juga diisi dengan penebaran benih ikan, edukasi lingkungan kepada masyarakat, serta senam sehat bersama warga. Berbagai kegiatan tersebut diharapkan dapat meningkatkan kepedulian masyarakat terhadap kelestarian lingkungan sekaligus menjadi bagian dari upaya mitigasi banjir di Kota Tangerang.

"Kami berharap kegiatan ini menjadi langkah awal dalam meningkatkan kesadaran masyarakat untuk menjaga kebersihan lingkungan. Ke depan kami juga akan menghadirkan program serupa dengan dukungan berbagai pihak agar pelaksanaannya semakin efektif dan berkelanjutan," tutup Ade. ■ SIN



FOTO: MUHAMMAD IQBAL/HUMAS DPRD KOTA TANGERANG

Penebaran benih ikan dalam acara Festival Kali Sabi yang berlangsung di kawasan Kali Sabi, Kelurahan Uwung Jaya, Kecamatan Cibodas, Kota Tangerang, Minggu (12/7/26).

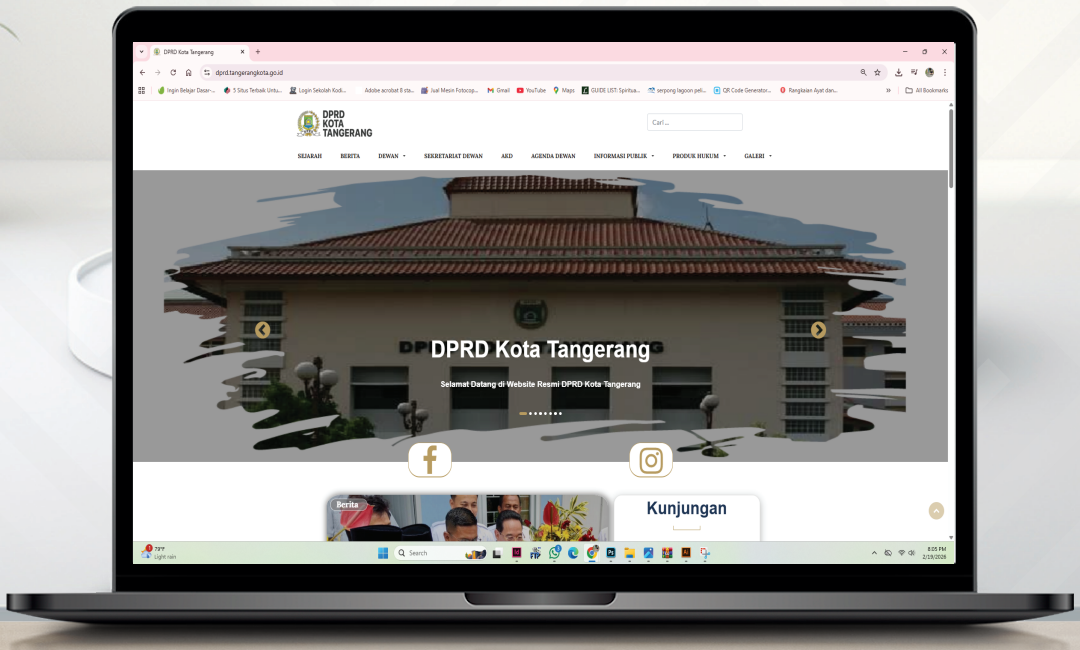


DPRD
Kota Tangerang

INFORMASI LENGKAPNYA DI WEBSITE KAMI

SCAN QR CODE
Untuk Informasi Lengkapnya

https://dprd.tangerangkota.go.id



dprdkotatangerang | dprd.tangerangkota.go.id | dprdkotatangerang | DPRDKotaTng